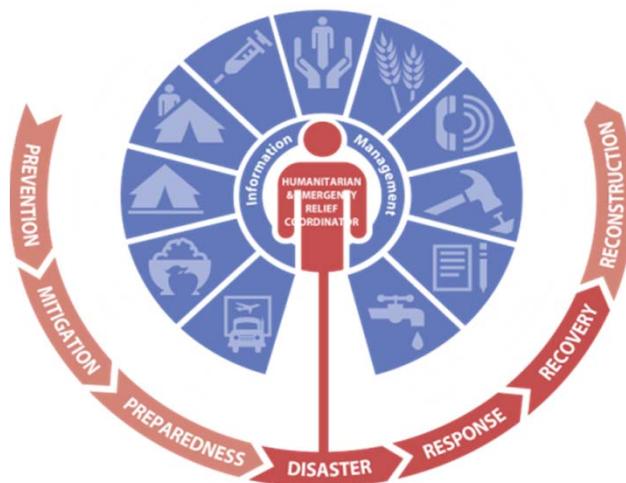


PENDEKATAN KLASTER DALAM TANGGAP DARURAT BENCANA DI INDONESIA



Ir. Dody Ruswandi, MSCE

DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN



LATAR BELAKANG

- Meningkatnya kejadian bencana di Indonesia memerlukan kecepatan dan ketepatan dalam koordinasi
- Peran dan kontribusi bantuan kemanusiaan internasional semakin besar
- Koordinasi yang kurang efektif dalam penanganan tanggap darurat yang melibatkan bantuan internasional
- Belum adanya mekanisme dalam aktivasi klaster kemanusiaan dalam penanggulangan bencana di Indonesia



Maksud dan Tujuan

- a. Penyelarasan klaster Pemerintah Indonesia dan klaster kemanusiaan
- b. Peran klaster kemanusiaan dalam kesipasiapsiagaan
- c. Membahas mekanisme aktivasi klaster kemanusiaan (bencana skala menengah dan besar)
- d. Mekanisme koordinasi dan sinkronisasi klaster nasional dan kemanusiaan



Klaster nasional yang diputuskan sementara adalah sebagai berikut:

No	Klaster	Kegiatan Utama	Koordinator
1	Kesehatan	Medis, identifikasi korban, kesehatan reproduksi, dampak psikososial dan juga kualitas gizi, air dan sanitasi	PPKK, Kementerian Kesehatan Ko-Koordinator: EHA WHO
2	Pencarian dan Penyelamatan	Pencarian dan penyelamatan	BASARNAS
3	Logistik	Permakanan, sandang, sistem logistik distribusi barang bantuan dan peralatan	Kementerian Sosial, Ko-Koordinator: Deputi BNPB Bidang Logistik dan Peralatan
4	Pengungsian dan Perlindungan	Keamanan, tempat penampungan sementara (Huntara), manajemen pengungsian, perlindungan kelompok rentan, psikososial	Kementerian Sosial
5	Pendidikan	Belajar mengajar formal dan informal, sekolah darurat, bimbingan dan penyuluhan bagi anak dan dewasa, kerohanian	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
6	Sarana dan Prasarana	Akses transportasi, telekomunikasi, energi, transportasi, perumahan (Huntap), pembersihan puing, air dan sanitasi	Kementerian Pekerjaan Umum
7	Ekonomi	Pertanian, perkebunan, peternakan, perdagangan, perikanan. Perlu diingat bahwa kegiatan ekonomi dalam masa tanggap darurat bersifat sementara dan menuju pemulihan.	Kementerian Pertanian dan Kementerian Koperasi dan UKM
8	Pemulihan Dini / Government	Klaster ini belum disepakati secara penuh dan diperlukan konsultasi lebih lanjut dengan Kementerian Dalam Negeri	



1. Kluster Kesehatan

Fokus kegiatan Klaster Kesehatan adalah untuk menurunkan angka kesakitan dan angka kematian dalam penanggulangan bencana.

Struktur dan Keanggotaan

- **Koordinator:** Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan (PPKK) – Kementerian Kesehatan
- **Ko-koordinator:** *Emergency and Humanitarian Action* (EHA – Aksi Tanggap Darurat dan Kemanusiaan), WHO

Keanggotaan: Kementerian/lembaga serta organisasi non pemerintah yang bekerja di bidang kesehatan (dalam diskusi klaster 15 Jan. 2014: PPK-Kemenkes, WHO, UNICEF, UNFPA, WFP, HOPE, OXFAM)

Peran dan tanggung jawab:

Disesuaikan dengan Pedoman Teknis Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Bencana (mengacu pada Standar Internasional) – PPKK 2011.

Rencana kerja tahun 2014:

- Mengadakan pertemuan 2 kali per tahun
- Pertemuan untuk membahas tentang keikutsertaan dalam MMThrust Tsunami Direx
- Mengadakan latihan bersama.
- Evaluasi kegiatan.



2. Kluster Pengungsian dan Perlindungan

Mengacu pada hasil pertemuan Penyelarasan Kluster pada 15 Januari 2014 (pagi), Klaster Pengungsian dan Perlindungan meliputi keamanan, tempat penampungan sementara, menjajemen pengungsian, perlindungan kelompok rentan, hiburan (psikososial).

Struktur dan Keanggotaan

- **Koordinator:** Kementerian Sosial (Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam)
- **Ko-koordinator:** belum dibahas/ditetapkan

Keanggotaan:

- Kemensos, KPPPA, KPAI, Unicef, Plant Inter, Child Fund, World Vision, HWW, Save The Children, Jesuit Refusee, PKBI, Handicapped Inter, Yakkum, UNFPA, Polri, TNI.

Rencana kerja 2014

- a. Pembahasan Kerangka Acuan
- b. Pemetaan sumber daya
- c. Pengujian Kerangka Acuan di FTX Megathrust Mentawai 16 Maret
- d. Pelatihan bersama
- e. Evaluasi dan Revisi Kerangka Acuan



3. Kluster Pencarian dan Penyelamatan

Peran utama:

- Menggerakkan, mengkoordinir, serta mengendalikan sarana dan personil dalam pelaksanaan operasi pencarian dan penyelamatan (SAR) terhadap korban bencana secara efisien dan efektif.

Struktur dan Keanggotaan

- **Koordinator:** BASARNAS
- **Sub-koordinator:** KANTOR SAR

Keanggotaan/Sub-klaster:

- TNI/Polri, Kemenhub, Kemenkes, BNPB, Pemda, Ormas, Swasta

Rencana kerja tahun 2014:

- Sosialisasi klastering SAR dengan sesama sub-klaster.
- Latihan peningkatan ketrampilan antar/inter sub-klaster.
- Membangun kolaborasi antar klaster dalam bidang operasi SAR dengan sistem komando tanggap darurat bencana.



4. Kluster Logistik

Peran dan tanggung jawab:

- memastikan koordinasi antar anggota klaster berjalan dengan baik dalam semua hal berkaitan dengan logistik.
- menggunakan manajemen informasi yang baik untuk dapat mengidentifikasi kapasitas logistik anggota klaster, kebutuhan kemanusiaan yang timbul, dll. terkait logistik;
- memberikan layanan (service) untuk klasternya serta memberikan layanan logistik yang diperlukan bagi para pelaku kemanusiaan dalam upaya tanggap darurat sesuai dengan kemampuan klaster
- menjadi *last resource* jika kebutuhan klaster logistik tidak dapat dipenuhi oleh siapapun dan perlu dipenuhi.

Struktur dan Keanggotaan

- **Koordinator:** Kementerian Sosial
- **Ko-koordinator:** BNPB (Deputi Bidang Logistik dan Peralatan)

Keanggotaan: Kemenkeu, Kemenhub, Kemen PU, PLN, Lembaga Usaha, dll

Rencana kerja tahun 2014:

- Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (TOR) dan keanggotaan
- Penyusunan Rencana Kesiapsiagaan Logistik



5. Kluster Sarana dan Prasarana

Tugas pokok:

- Mengkoordinasikan sarana dan prasarana seluruh sub-klaster (Transportasi, Telekomunikasi, Energi, Air dan sanitasi, Debris Clearance, Hunian Tetap) selama fase tanggap darurat dan pemulihan dini sesuai dengan tingkat dan status bencana.

Struktur dan Keanggotaan

- **Koordinator:** Kementerian Pekerjaan Umum

Keanggotaan: Kemenhub, Kominfo, Kemen ESDM, Kemen PU, Kemenpera, WFP, UNICEF, OXFAM

Rencana kerja tahun 2014:

- Menyelenggarakan pelatihan dukungan komunikasi radio penanggulangan bencana (KemKominfo)
- Pelatihan RSCPB (Kemhub)
- Pelatihan Penanggulangan Darurat (Kemen PU)
- Penanggulangan Darurat Infrastruktur (PU)
- Sosialisasi klaster (nasional dan internasional)
- Pertemuan klaster untuk menyusun TOR.



6. Kluster Ekonomi

❑ Peran dan tanggung jawab

- Memastikan koordinasi yang efektif antar anggota
- Memastikan koordinasi dengan klaster-klaster lain
- Memastikan kebutuhan, risiko, kapasitas dan kesempatan telah dikaji dan dipahami secara baik oleh anggota

❑ Struktur dan Keanggotaan

- **Koordinator:** Kementerian Pertanian
- **Ko-koordinator:** Kementerian Koperasi dan UKM

❑ Keanggotaan: Kementan, KKP, Kementerian Koperasi dan UKM, Kemenperindag, Kemenhub, FAO, ILO.

❑ Rencana kerja tahun 2014:

- Rapat anggota klaster
- Penentuan struktur dan tanggung jawab serta penanggung jawabnya
- Pembuatan Pedoman Kerja atau Petunjuk Teknis klaster ekonomi termasuk mekanisme pengajuan dana untuk masa/fase pemulihan dini (*early recovery*)



7. Kluster Pendidikan

- ❑ Untuk Kluster Pendidikan masih belum dibahas secara detail karena belum ada perwakilan dari Kementerian Pendidikan

8. Pemulihan Dini

- ❑ Pemulihan dini dimaksudkan untuk membantu Pemerintah Daerah yang terkena bencana untuk dapat segera menjalankan aktivitas pemerintahannya seperti sedia kala. Pemerintah Daerah sendiri dibawah Kemendagri. Karena Kemendagri belum ada perwakilan maka masih belum disepakati dan masih dibutuhkan konsultasi yang lebih jauh



Terima Kasih



B N P B

- DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN
 - Graha 55, Jl. Tanah Abang II No. 57 Jakarta Pusat
 - Telp. 021-380 2392 ; Fax. 021-380 2391
 - www.bnrb.go.id